

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Etnis Rohingya adalah kelompok yang beragama Muslim yang tinggal di negara Myanmar, yang di mana mereka tinggal di kawasan Rakhine (Arakan) di Myanmar Barat, berbatasan langsung dengan Bangladesh. Etnis Rohingya dianggap sebagai “orang tanpa negara” karena pemerintahan Myanmar tidak mengakui mereka warga yang sah.

Dalam Perkara ini etnis Rohingya tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya yang selayak dinikmati warga negara Myanmar lainnya. Dalam Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 etnis Rohingya gagal mendaftarkan sebagai kelompok etnis yang memiliki 135 etnis yang diakui oleh penduduknya dan pemerintahan Myanmar mengamati Rohingya sebagai imigran gelap atau ilegal yang berasal dari negara tetangga, Bangladesh. Tanpa hak kewarganegaraan menjadikan Rohingya sebagai salah satu populasi besar tanpa kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitas, penahanan dan pelecehan.<sup>1</sup>

Situasi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar memang menjadi isu yang sangat serius dan kompleks. Pemerintah Myanmar kurang mendapat perhatian terhadap etnis Rohingya, pasti dasingkan. Adanya Diskriminasi terhadap etnis Rohingya mengakibatkan rendahnya peran negara untuk mendukung perlindungan. Tindakan

---

<sup>1</sup> Rohingya safe but not secure in Bangladesh.  
<https://www.refugeesinternational.org/reports/2017/rohingyabangladesh> diakses tanggal 10 Januari 2023.

konflik ini berupa kekerasan secara terbuka. Dukungan kekerasan Sebagian besar dari pemerintah dan juga militer.<sup>2</sup>

Di era modern saat ini, permasalahan krisis kemanusiaan menjadi masalah yang sering terjadi. Krisis kemanusiaan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana hak-hak individu dilanggar atau tidak terpenuhi, seperti hak untuk hidup, hak atas keadilan yang sesuai dengan kebutuhan, hak merasa sejahtera, hak untuk berpendapat, hak-hak agama dan hak-hak dasar lainnya. Ditemukan adanya berbagai factor yang dapat menyebabkan krisis, salah satunya adalah ketidakmenerimaan terhadap perbedaan seperti perbedaan ras, etnis, suku, agama, warna kulit, dan lain-lain. Konflik yang terjadi dapat melibatkan perselisihan antara individu, kelompok kecil, bahkan kelompok besar.<sup>3</sup>

Fenomena ini terus saja muncul dari masa ke masa. Pemicu adanya krisis kemanusiaan berulang kali terjadi di lingkungan kita tinggal kelompok-kelompok atau beregu atas saling cekcok. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan antar kelompok. Disamping itu, tidak ada usaha untuk mengatasi konflik yang terjadi di Myanmar membuat konflik krisis kemanusiaan terjadi.

Efek terjadinya krisis kemanusiaan yang ada di Rohingya, menjadikan mereka ingin keluar dari negaranya sendiri (Myanmar) dan mengungsi ke negara lain sebagai solusinya. Tanpa disadari krisis kemanusiaan sudah lama terjadi menimpa etnis Rohingya, sehingga negara-negara lain menjadi korban dalam tujuan mereka untuk menetap tinggal setidaknya terdapat rasa aman dari diskriminasi yang terjadi di negaranya sendiri. Sebagai contoh pindah kewarganegaraan di negara bagian Asia Tenggara yang menjadi tujuan utama

---

<sup>2</sup> Ipung Pramudya Setiawan & Made Selly Dwi Suryanti, “Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)”, Jurnal Politik dan Pemerintahan, [file:///C:/Users/zanei/Downloads/3741-Article%20Text-19202-1-10-20210916%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/zanei/Downloads/3741-Article%20Text-19202-1-10-20210916%20(2).pdf), 1 Februari 2021, hal : 83-97, diakses pada 18 Maret 2023.

<sup>3</sup> Astri Apriani, “KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA DI MYANMAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN)”, <http://digilib.uinsgd.ac.id/52583/1/Astri%20Apriani%201193030015%20HTN%206A%20-%20UAS%20LEMBAGA-LEMBAGA%20INTERNASIONAL.pdf>, 24 Agustus 2017, hal 4, diakses pada 19 Maret 2023.

mereka untuk menetap tinggal, karena negara seperti negara Malaysia, Indonesia, dan Thailand saling berdekatan dengan Negara Myanmar.

Indonesia sendiri merupakan negara tempat wadah yang menerima imigran dari etnis Rohingya. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar kedatangan imigran dari Rohingya pasti mengakibatkan ancaman dari segi keamanan maupun ekonomi yang dihadapi Indonesia nantinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dari itu Indonesia berperan dalam masalah konflik yang ada di Rohingya Myanmar.

Secara politik luar negeri, Indonesia berkomitmen pada UUD 1945, untuk menjaga perdamaian abadi yang berlandaskan kepada keadilan sosial dan berkontribusi secara signifikan untuk membantu masalah Etnis Rohingya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Etnis Rohingya dan menyelesaikan kekerasan di Myanmar. Indonesia bersumpah setiap Tindakan yang mengancam keras Tindakan Myanmar dan melakukan pembersihan etnik dan pemecahan Rohingya yang sangat bejat.

Etnis Rohingya adalah sebuah kelompok etnis yang mayoritas tinggal di negara Myanmar (dahulu dikenal sebagai Burma), terutama di negara bagian Rakhine di barat daya Myanmar. Mereka adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang tinggal di wilayah tersebut. Latar belakang etnis Rohingya memiliki sejarah yang kompleks dan sering kali penuh dengan konflik. Beberapa poin penting dalam latar belakang etnis Rohingya meliputi:

**Asal Usul:** Orang-orang Rohingya mengklaim bahwa mereka adalah penduduk asli wilayah Rakhine dan memiliki akar sejarah yang panjang di sana. Namun, pemerintah

Myanmar dan beberapa kelompok lain telah menolak klaim ini, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

**Kewarganegaraan:** Sejak tahun 1982, pemerintah Myanmar telah mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang mengakibatkan mayoritas etnis Rohingya menjadi tanpa kewarganegaraan dan dianggap sebagai warga negara keturunan asing. Ini mengakibatkan pemberian hak-hak dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, menjadi sangat terbatas bagi Rohingya.

**Status Pengungsi:** Akibat penganiayaan dan kekerasan, sebagian besar etnis Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga, terutama Bangladesh. Mereka tinggal dalam kamp-kamp pengungsian yang sangat penuh sesak dan kondisi hidup yang sulit.

**Respons Internasional:** Komunitas internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia dan negara-negara lain, telah mengutuk penganiayaan terhadap etnis Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pengadilan internasional juga telah mempertimbangkan tuduhan genosida terhadap pemerintah Myanmar.

**Upaya Bantuan dan Pemulihan:** Beberapa organisasi kemanusiaan dan pemerintah asing telah berusaha memberikan bantuan kepada etnis Rohingya yang terkena dampak konflik. Upaya pemulihan jangka panjang mencakup upaya untuk kembali ke Myanmar dengan aman, serta upaya untuk mencapai solusi politik yang mengakui hak-hak dan identitas etnis Rohingya.

**Konflik dan Penganiayaan:** Selama beberapa dekade terakhir, etnis Rohingya telah mengalami berbagai bentuk penganiayaan dan konflik dengan pemerintah Myanmar, yang meliputi diskriminasi, pembatasan kebebasan bergerak, kekerasan, dan bahkan kampanye

militer besar-besaran. Puncaknya terjadi pada Agustus 2017, ketika kampanye militer mengakibatkan lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Peran Indonesia dalam membantu pengungsi konflik etnis Rohingya di Myanmar melibatkan faktor-faktor kemanusiaan, diplomasi, dan perhatian terhadap stabilitas regional. Konflik etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung selama bertahun-tahun dan telah menyebabkan krisis kemanusiaan serius. Rohingya, sebuah kelompok minoritas Muslim di negara mayoritas Buddha Myanmar, telah menghadapi diskriminasi sistemik, pembatasan hak-hak asasi, dan kekerasan yang meluas.

Berikut beberapa poin latar belakang peran Indonesia dalam membantu pengungsi konflik etnis Rohingya Myanmar:

**Prinsip Kemanusiaan:** Indonesia memiliki tradisi panjang dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu komunitas Muslim Rohingya yang mengalami persekusi di Myanmar.

**Solidaritas Umat Muslim:** Perlakuan terhadap Rohingya telah menarik perhatian umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tekanan dari masyarakat sipil, organisasi Islam, dan ulama-ulama Islam juga telah mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan demi membantu Rohingya.

**Diplomasi Kemanusiaan:** Indonesia telah berusaha menggunakan diplomasi untuk mendorong pemerintah Myanmar agar mengatasi konflik etnis Rohingya. Indonesia berusaha bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah ini, termasuk melalui pertemuan regional dan kerjasama diplomatik.

**Peran sebagai Pemimpin ASEAN:** Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam mengoordinasikan upaya regional dalam

mengatasi krisis kemanusiaan. Indonesia memiliki pengaruh yang dapat digunakan untuk mendorong dialog dan solusi yang melibatkan negara-negara ASEAN dalam mengatasi krisis Rohingya.

**Penampungan Pengungsi:** Indonesia telah membantu menampung beberapa pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Meskipun jumlah pengungsi yang diterima mungkin tidak besar, tindakan ini mencerminkan semangat kemanusiaan dan solidaritas.

**Penggalangan Bantuan Kemanusiaan:** Selain tindakan pemerintah, masyarakat Indonesia juga telah berpartisipasi dalam penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan untuk membantu pengungsi Rohingya. Organisasi non-pemerintah, LSM, dan individu berusaha memberikan dukungan finansial dan materi kepada mereka yang membutuhkan.

**Perhatian terhadap Stabilitas Regional:** Krisis kemanusiaan di Myanmar, termasuk konflik etnis Rohingya, memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas regional. Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara merasa perlu berkontribusi dalam mengatasi krisis ini agar tidak merambat menjadi ancaman keamanan dan stabilitas di kawasan.

Ketika pemerintah Myanmar mendukung operasi militer sebagai pembalasan atas serangan terhadap kantor polisi dan pos militer yang dilakukan oleh organisasi bersenjata Rohingya, juga dikenal sebagai ARSA, pada tahun 2017, tekanan terhadap komunitas minoritas meningkat.

Menurut laporan Amnesty International, operasi pengumpulan dana dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat mengakibatkan tindakan genosida karena militer Myanmar dengan sengaja melakukan penipuan, penyiksaan,

pembunuhan, dan pembakaran di desa dengan 1.500 rumah tersebut, yang sebagian besar merupakan rumah tinggal. kelompok etnis Rohingya.

Sekitar 626.000 warga Rohingya terkena dampak bencana tersebut; mayoritas melarikan diri ke Bangladesh, dan sisanya mencari keamanan di negara-negara tetangga termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia, negara dengan sejarah serupa, menyadari kesulitan dan kompleksitas yang akan dihadapi Myanmar dalam menyelesaikan konflik. Indonesia telah mendorong, mendorong, dan akan terus mendorong pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan benar dan tuntas. Indonesia juga akan terus mendukung upaya pemerintah Myanmar dalam upaya perdamaian dan resolusi konflik. Konflik internal Myanmar termasuk yang menyangkut etnis minoritas Rohingya.

Berdasarkan garis besar politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu menjaga perdamaian global dan perdamaian abadi yang berdasarkan keadilan sosial, Indonesia menunjukkan rasa belas kasihan dan berperan cukup signifikan dalam membantu menangani krisis etnis Rohingya di Myanmar.

Presiden Jokowi Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk membantu krisis etnis Rohingya dan penyelesaian konflik di Myanmar. Indonesia mengecam pembersihan etnis dan diskriminasi yang dilakukan Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya dengan kata-kata kasar.

Untuk membantu menangani Etnis Rohingya di Myanmar, yang harus pertama dilakukan oleh Indonesia adalah menjalin hubungan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Berbicara tentang masalah Etnis Rohingya di Myanmar di forum

internasional untuk memberi tahu pemerintah Myanmar sebagai solusi. Indonesia mendirikan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang kemanusiaan pada 31 Agustus 2017.

Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau (AKIM) merupakan LSM yang bertujuan untuk membantu Masyarakat khususnya di Myanmar yang mengalami krisis kemanusiaan. AKIM memiliki setiap anggota terdiri dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Palang Merah Indonesia, PKPU, dan Aksi Cepat Tanggap. Untuk Myanmar, AKIM memiliki program kerja yang disebut Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program HASCO ini untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas Masyarakat yang berada di wilayah yang terkena dampak konflik di Rakhine.<sup>4</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada terhadap Peran Indonesia dalam membantu pengungsi Konflik Rohingya pada tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini untuk memahami kontribusi Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan ini serta dampak dari bantuan yang diberikan. Berdasarkan topik yang diambil, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana peran Indonesia dalam membantu pengungsi etnis Rohingya di Myanmar?
2. Bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam berhubungan dengan pemerintah Myanmar dan negara-negara lain terkait krisis pengungsi Rohingya?

---

<sup>4</sup> Indah Nur, "PERANAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENANGANAN MASALAH ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR (2014-2017)", Global Political Studies Journal, <file:///C:/Users/A40968/Downloads/2022-Article%20Text-4805-1-10-20190815.pdf>, Vol. 1 No. 2 Oktober 2017, diakses pada 19 Maret 2023.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian ini dapat mencakup penilaian terhadap dampak dari respons Indonesia terhadap krisis ini. Misalnya, sejauh mana bantuan yang diberikan telah membantu memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, meredakan ketegangan, dan membantu mereka dalam memulihkan kehidupan mereka dan membahas bagaimana Indonesia telah menggunakan diplomasi kemanusiaan untuk mempengaruhi pemerintah Myanmar dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengatasi krisis etnis Rohingya. Ini bisa mencakup partisipasi dalam pertemuan regional dan internasional serta upaya diplomasi bilateral. Serta memberikan pandangan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam merespons krisis ini, serta pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut untuk perbaikan di masa depan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Indonesia telah merespons krisis pengungsi Rohingya, termasuk upaya-upaya pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Ini akan membantu mengungkapkan latar belakang dan konteks dari respons Indonesia.

Dapat memberikan masukan berharga kepada pembuat kebijakan di Indonesia. memberikan pandangan tentang apa yang telah berhasil dilakukan dan di mana ada potensi perbaikan dalam respons pemerintah terhadap krisis kemanusiaan di masa depan.

Penelitian ini juga dapat membantu menganalisis bagaimana respons terhadap krisis ini dapat mempengaruhi stabilitas regional. Ini memiliki implikasi yang lebih luas terkait politik, keamanan, dan hubungan antarnegara di Asia Tenggara.

Pada intinya, penelitian ini akan memberikan informasi dan pandangan yang mendalam tentang peran Indonesia dalam membantu pengungsi konflik etnis Rohingya di Myanmar, dan

informasi ini dapat memiliki dampak positif dalam konteks kemanusiaan, diplomasi, dan pembangunan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya tulis yang akan dibuat terdiri dari enam bab yang masing-masing memperlihatkan point-point yang berbeda. dalam penjelasan karya tulis semua ini mencangkup saling mendukung dan melengkapi.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan gagasan utama dari keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi karya tulis yang diawali dengan latar belakang masalah mengenai apa yang menjadi alasan memilih judul, kemudian terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan teori.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, Teknik pengumpulan data serta kredibilitas.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang akan dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kualitatif.

#### **BAB V ANALISIS**

Pada bab ini berisi hasil pembahasan / analisis yang berisi Bagaimana peran Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.

#### **BAB VI KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi hasil kesimpulan dari hasil penelitian skripsi saya.

